

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang bersifat antarpemerintahan, organisasi ini merupakan organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-bangsa dengan beranggotakan 57 negara<sup>1</sup>tersebar lebih dari empat benua.ini adalah suara kolektif dunia Muslim. Organisasi ini berupaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian internasional dan harmoni antara berbagai orang di dunia.Organisasi ini didirikan berdasarkan keputusan KTT sejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijra (25 September 1969) setelah pembakaran kriminal dari Masjid Al-Aqsa di pendudukan Yerusalem. OKI sendiri memiliki prinsip Organisasi yang pada dasarnya untuk

---

<sup>1</sup> Afghanistan, Aljazair, Chad, Guinea, Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Senegal, Sudan, Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, Yordania, Bahrain, Oman, Qatar, Suriah, UAE, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda, Burkina Faso, Kamerun, Komoro, Irak, Maladewa, Djibouti, Benin, Brunei, Nigeria, Azerbaijan, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Uzbekistan, Suriname, Togo, Guyana, Pantai Gading

memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara-negara terutama negara Muslim.<sup>2</sup>

OKI sebagai organisasi yang dibentuk oleh negara-negara islam bergerak dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan perdamaian. Perdamaian yang selama ini diupayakan oleh OKI salah satunya yaitu Palestina dan Israel. Selain itu masih ada contoh lain upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh OKI, salah satunya yakni konflik di Mindanao yakni antara penduduk muslim Moro dan Pemerintah Filipina. Di konflik ini OKI sebagai organisasi yang menjunjung solidaritas terhadap umat muslim muncul untuk menjadi mediator dalam konflik ini. OKI pada awal mulanya diminta oleh pemimpin MNLF untuk menjadi mediator dalam konflik ini dan OKI dibantu dengan PBB untuk menyelesaikan permasalahan karena OKI dianggap organisasi Islam dan lebih bias diterima masyarakat moro dalam menyelesaikan konflik yang sudah berangsur sejak lama.

Di sisi lain OKI disini muncul bukan karena hanya solidaritas sesama umat muslim melainkan konflik Mindanao juga di intervensi oleh pihak luar yang mencari kesempatan dalam konflik ini. tindakan suku Moro dianggap oleh beberapa pihak di dunia Internasional sebagai separatisme Islam, seperti contohnya Amerika Serikat langsung mengintervensi konflik ini dengan berpihak pada Pemerintahan Filipina karena Suku Moro sendiri dianggap sebagai separatisme. diskursus separatisme dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep legitimasi atau kekuasaan terhadap pemerintah yang berkuasa.pemikiran tersebut sudah lama

---

<sup>2</sup>[http://www.oic-oci.org/page/?p\\_id=52&p\\_ref=26&lan=en](http://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en) diakses tanggal 17 April 2018

dikembangkan oleh pemikir-pemikir islam klasik seperti al-Ghazali, al-Mawardi, ataupun Ibn Taimiyah. (Surwandono & Ahmadi, 2011)

Suku Moro sendiri adalah penduduk muslim asli yang berdiam di Mindanao, Filipina Selatan. Penduduk muslim di Mindanao atau suku Moro ini hidup dengan menerapkan norma-norma dan hukum islam yang sudah diterapkan sejak dahulu. Konflik Mindanao sendiri merupakan konflik yang muncul di abad ke 15 dari perlawanan Penduduk Mindanao terhadap kolonisasi pemerintah Spanyol ketika berhasil menguasai Kepulauan Luzon dan hendak memperluas daerah kekuasaan ke selatan Filipina yakni Mindanao. Kolonisasi berpindah tangan dari Spanyol ke AS menjelang perang dunia ke II. Perpindahan kolonisasi menjadi nilai positif karena para Datus yang merupakan representasi pemimpin politik dan kebudayaan di Mindanao diberikan ruang untuk mempertahankan budaya Islam yang ada di Mindanao.

Pada tahun 1926 mulai terjadi konflik antara pemerintah AS dan penduduk Mindanao disebabkan oleh kebijakan AS yang menggabungkan pemerintah yang berada di Luzon dengan yang ada di Mindanao melalui kebijakan Bacon Bill. Kebijakan tersebut menuai protes dari masyarakat dan datus di Mindanao namun pemerintah AS tetap melaksanakan kebijakan tersebut dan Filipina merdeka dengan memasukkan wilayah Mindanao sebagai wilayah administratif dari negara Filipina. Kemerdekaan Filipina disambut baik oleh masyarakat Filipina kecuali wilayah Mindanao yang merasa tidak satu identitas dengan orang Luzon yang non

Muslim. Hal ini menyebabkan konflik yang mulai terjadi pada 4 Juli 1946, yaitu terjadi konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Filipina yang ingin mengapus hukum-hukum Islam dan diganti dengan hukum yang berlaku di Filipina.

Konflik ini menimbulkan banyak penyerangan yang terjadi di Filipina Selatan, pada akhirnya terjadi penyerangan terhadap kantor pemerintah Filipina di Manila membuat pemerintah sakit hati dan tidak mau mengakui hukum adat di Mindanao. Sikap tersebut membuat Nur Misuari membentuk MNLF (Moro National Liberation Front) pada tahun 1969 sebagai kelompok pejuang di Mindanao. Kedekatan antara pendiri MNLF dengan pemimpin Libya yaitu Muammar Khadafi ketika itu membuat MNLF memiliki kekuatan dalam melakukan pemberontakan. Kelompok ini dibentuk sebagai gerakan masyarakat Mindanao untuk merdeka dan keluar dari Filipina yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami masyarakat Mindanao dalam hal politik dan ekonomi. Malaysia dan Libya merupakan negara pendukung MNLF dengan memberikan pelatihan kepada militan-militan dan dana kepada MNLF.(Abdullah & Sharon, 1989)

Tahun 1970-an merupakan periode paling kejam dalam perjuangan MNLF untuk Republik Bangsamoro dan konflik paling berdarah di wilayah Filipina sejak Perang Dunia II. Dalam empat tahun pertama sejak Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan darurat militer pada tahun 1972, ada 120.000 korban sipil dan militer. Selama periode yang sama, 100.000 Muslim melarikan diri dari wilayah Mindanao yang dilanda

konflik untuk mencari perlindungan di negara tetangga Malaysia dan satu juta orang mengungsi secara internal. Pada tahun 1975, konflik antara pemerintah Filipina dan MNLF telah mencapai jalan buntu.

Dan kejadian tersebut merupakan awal mula konflik ini menjadi sorotan dunia internasional, pada tahun 1975 OKI yang terbentuk atas dasar solidaritas muslim mengakui bahwa MNLF adalah satu-satunya representatif umat muslim sehingga OKI memutuskan status observasi. Dengan bantuan OKI dan pemerintah Malaysia (Founding Father dari OKI) pemerintah Filipina melakukan perundingan perdamaian untuk pertama kalinya pada tahun 1975 dan dilanjutkan perjanjian perdamaian di Tripoli, Libya pada tahun 1976.

Pada masa pemerintah Cory Aquino dari tahun 1986-1992 menghasilkan perjanjian Jedda Accord tahun 1987, Cory Aquino digantikan oleh Fidel Ramos (1992-1994) dimana Fidel Ramos kembali meneruskan negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF yang kembali menghasilkan perjanjian antara keduanya dan terjadi konsolidasi antara MNLF dan pemerintah Filipina yang menghasilkan final peace agreement (FPA).

Pasca FPA kondisi di mindanao tidak lantas membaik belum genap 1 tahun disini Nur Misuari menyatakan kekecawaannya melakukan perundingan tersebut, karena terlalu banyak miscalculasi dan oportunistik dalam FPA. Terutama di tingkat masyarakat katolik karena Nur Misuari dianggap masyarakat katolik bekas pemberontak jika lantas memimpin maka dikhawatirkan akan melakukan kebijakan yang diskriminatif bahkan represif terhadap masyarakat katolik di mindanao.

Setelah itu gagalnya FPA ditandai juga saat Fidel Ramos digantikan oleh Estrada. Proses perdamaian yang sudah digagas dan diperjuangkan oleh presiden sebelumnya justru tidak diteruskan dan tidak ditatai oleh presiden Estrada. Sikap all out war terhadap MILF justru dibuat oleh Estrada. Pengakuan MNLF sebagai perwakilan Mindanao membuat MILF diserang oleh pemerintah Filipina, Estrada beranggapan bahwa untuk mencapai perdamaian abadi adalah dengan membantai semua MILF dan institusinya.

Setelah itu pada tahun 2007 konflik juga kembali terjadi antara penduduk muslim dan kristen di mindanao yang diakibatkan oleh perselisihan tanah antara kedua belah pihak tersebut, sehingga pemerintah filipina tidak bisa tinggal diam dan melakukan gencatan senjata terhadap konflik ini, tindakan ini memancing perlawanan dari penduduk muslim sekitar sehingga menyulut konflik terjadi kembali terulang lagi.

OKI melakukan upaya penuh dalam kejadian tersebut, OKI mengupayakan pertemuan tripartit antar kedua belah pihak pasca kejadian tersebut dimana pertemuan tersebut antara MILF, Pemerintah Filipina dan OKI. Pasca pertemuan tripartit yang diadakan beberapakali ini konflik juga tidak lantas mereda, pada tahun 2012 terjadi serangan bersenjata kembali di cotabato city dan membuat OKI terus melakukan upaya kembali untuk mencari perdamaian yang abadi antara kedua belah pihak ini sendiri.

Pada tahun 2015 menjadi sejarah terkelam di Mindanao dengan tewasnya 44 komando polisi yang bentrok dengan pemberontak di selatan Filipina. (BBC, 2015). Hal ini membuat OKI kembali tergerak dalam

konflik ini, sebagai organisasi yang turut serta menjaga perdamaian di selatan Filipina OKI mengirimkan dutanya untuk perundingan dengan kedua belah pihak agar kejadian ini tidak berkepankangan.

Pada tahun 2017 OKI masih mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak karena OKI masih dianggap dunia Internasional dikarenakan keberhasilan menciptakan Final Peace Agreement. Pendekatan kepada kedua belah pihak dilakukan oleh OKI dimana OKI mengutus dutanya untuk berunding dengan presiden Duterte guna melaksanakan perundingan untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak dengan mengadakan sidang di Abidjan Pantai Gading tahun 2017. (cooperation, 2017)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari rumusan masalah diatas penulis dapat menarik rumusan masalah **“Bagaimana upaya OKI dalam menyelesaikan konflik Moro di Mindanao Filipina Selatan pada tahun 2017?”**

## **C. Kerangka Teori**

Dari permasalahan yang akan di kaji, maka diperlukan teori dan konsep untuk menjawab permasalahan tersebut sekaligus dijadikan acuan sebagai landasan berfikir. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep yang dapat dijadikan sarana eksplanasi dan dasar bagi prediksi. Konsep yang diterapkan dalam penelitian ini yakni, konsep resolusi konflik

## 1. Global Governance

Governance disini tidaklah sinonim dari government, memang keduanya merujuk pada perilaku yang terarah, aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tertentu dan adanya seperangkat aturan tertentu. Government memiliki wewenang untuk memastikan implementasi kebijakannya terlaksana, sedang governance, sisi lain merujuk pada aktivitas yang berlandaskan tujuan atau kepentingan bersama yang bisa saja namun tidak selalu bersumber pada tanggung jawab legal formal, dan dan tidak bergantung pada keharusan adanya kekuasaan/otoritas, baik untuk memastikan pemenuhannya , ataupun untuk menyelesaikan pertentangan yang timbul dalam pelaksanaannya. Governance dengan demikian, merupakan fenomena yang lebih luas dan kompleks dari government sebab ia melingkupi intuisi pemerintah, dan di sisi lain juga melibatkan mekanisme informal/non-pemerintah, yangmana didalamnya individu dan organisasi bersama-sama bekerja mencapai tujuannya. (Margaret P. Karns, 2004)

Menurut Rosenau Global Governance adalah sebuah gerakan yang berusaha mengintegritaskan para aktor transnasional dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. (Rosenau, 1992). Munculnya konsep global governance dalam diskursus hubungan internasional merupakan respons dari semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia serta menguatnya



aktor-aktor baru (non-state) yang menawarkan peran yang lebih beragam. Terkait persoalan dan ancaman yang dihadapi umat manusia dalam dunia internasional, setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi kepeduliam global governance, yakni perosalan keamanan dan persoalan ekonomi.

Konsepsi terhadap keamanan kini terus berkembang lebih kompleks dari sebelumnya, tidak lagi semata-mata ancaman dari negara lain tetapi ancaman tentang konsepsi keamanan menjadi lebih beragam seperti ancaman dai entitas terkecil seperti kelompok dan individu, konsep keamanan saat ini juga sudah berkembang dari pemahaman akan keamanan tradisional yang lebih menekankan ancaman terhadap negara melalui kekuatan militer dan senjata, ke konsep keamanan non-tradisional yang bertumpu pada keamanan secara luas yang dihadapi manusia. Oleh karena itu penanganan keamanan tidak hanya negara yang mendominasi penyelsaian maslah, namun aktor-aktor lain di luar negara juga memiliki posisi yang sama pentingnya.

Disini OKI hadir sebagai Global Governance yang mana dalam konteks ini OKI hadir menjadi pihak non-state yang terlibat di dalam konflik antara pemerintah filipina dan suku moro, disini OKI muncul sebagai tata kelola global yang menaungi negara-negara Islam dan juga fokus pada masalah-masalah yang terjadi pada dunia Islam untuk memberikan solusi untuk menangani masalah yang sedang terjadi.

## **2. Konsep Resolusi Konflik**

Konflik adalah dinamika yang sering terjadi di dalam Hubungan Internasional, biasanya konflik muncul dikarenakan tidak tercapainya kepentingan salah pihak dalam sebuah negosiasi. Akhirnya konsep resolusi ini dianggap konsep yang paling tepat untuk menganalisa studi kasus ini. Resolusi Konflik adalah upaya menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara pihak-pihak yang mengalami konflik.(Simon Fisher, 2001)

Banyak versi tentang resolusi konflik, banyak pula sudut pandang dalam resolusi konflik tersebut karena setiap expert memiliki pandangannya terhadap resolusi konflik tersebut, seperti contoh seorang budayawan dan seorang ahli ekonomi memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memecahkan konflik yang terjadi. Point yang terpenting adalah banyak kemungkinan perbedaan versi dalam teori konflik dan bermacam macam perbedaan dalam teori tentang konflik, namun ada perbedaan penting dalam dalam terminology dan fokusnya, tetapi dalam setiap teori resolusi konflik point utamanya adalah mengkonseptualisasi bagaimana konflik social pada manusia bias terpecahkan.

Dalam menyediakan bantuan untuk menjelaskan keberagaman tentang konflik social kita dapat mengelompokan hal tersebut dalam beberapa tipe yang mana beberapa tipe memiliki sudut pandang yang fundamental, meskipun

banyak teori yang dikembangkan tentang resolusi dalam mengidentifikasinya kita tetap harus memperhatikan beberapa factor utama dalam mengidentifikasinya yakni:

1. *Individual characteristics theories* melihat konflik social dengan sifat bawaan dari setiap individu yang terlibat.
2. *Social process theories* melihat bahwa konflik adalah bagian dari proses interaksi social baik individu maupun kelompok, karena pada setiap interaksi yang terjadi disitu juga konflik muncul. Selain itu juga untuk *mengeneralisasikan* sifat dari dari proses ini.
3. *Social structural theories* melihat bahwa konflik adalah produk yang tercipta dari terbentuknya masyarakat.
4. *Formal theories* mencari untuk memahami bahwa konflik yang terjadi pada manusia secara logis dan dalam hitungan matematika. Teori ini memperhatikan angka-angka yang berpengaruh seperti jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan sebagainya untuk membuktikan darimana konflik itu muncul sehingga dapat disimpulkan resolusi konflik yang tepat dari hasil yang ditemukan. (Schellenberg, 1996, p. 13)

Selain dari ilmuwan Agama Islam juga menaruh perhatian khusus pada resolusi konflik ini sendiri. Karena pada hakikatnya sejarah menunjukkan bahwa Islam terlahir pada kondisi konflik yang sangat akut di tingkat local maupun Internasional. Dengan demikian mejadi teramat penting untuk menggali kembali struktur nilai Islam yang sangat apresiatif dengan semangat “kedamaian, keselamatan, pasrah, tunduk” yang tertera pada kata Islam itu sendiri. Banyak sekali ayat al-Qur’an yang memberikan informasi untuk menyelesaikan konflik secara damai, bahkan Rasulullah SAW juga sudah memberikan banyak contoh, bahwa dia selama masa menyebarkan agama Islam banyak di Dzalimi banyak pihak namun beliau tetap tidak melakukan tindakan kekerasan bahkan beliau menyikapi dengan tenang dan tidak menjadikan musuh orang atau golongan yang telah mendzaliminya. Karena dalam Islam juga diajarkan sekalipun kita berhadapan dengan pihak yang dzalim, kita tetap diperintahkan untuk tetap berlaku adil<sup>3</sup>

Dalam resolusi konflik ada 5 pendekatan utama yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi dan untuk memecahkan konflik tersebut sendiri, bentuk-bentuk pendekatannya adalah sebagai berikut:

1. *Coercion*, memaksa atau menekan salah satu pihak yang terlibat konflik

---

<sup>3</sup> (QS. 5:8)

untuk mendapatkan keputusan tertentu.

2. *Negotiation and bargaining*, atau melibatkan pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah yang mana pihak yang berkonflik juga membuat perjanjian sehingga timbul hasil akhir yang disepakati kedua belah pihak.
3. *Adjudication*, atau dengan menggunakan kekuasaan negara dan itu merupakan system yang legal untuk menentukan sebuah keputusan.
4. *Mediation*, menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dan juga membuat perdamaian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
5. *arbitration*, penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengkata terkait masalah yang mereka sengkatakan. (Schellenberg, 1996, p. 13)

Dalam studi kasus ini OKI berperan sebagai mediator dalam konflik Moro Mindanao Filipina Selatan. Dimana kita disini *mediasi* adalah proses perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dan juga membuat perdamaian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Menjadi mediator dalam konflik juga mempunyai harus memperhatikan syarat – syarat tertentu :

1. Mediator berperan memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang kesulitan menemukan jalan tengah untuk mencapai perdamaian.
2. Mediator harus berasal dari pihak yang netral tidak berpihak pada kubu manapun, mediator juga harus mengarahkan pihak-pihak menuju kesepakatan
3. Mediasi bersifat sukarela: meski terkadang mediasi adalah perintah pengadilan (dalam hal ini tidak bersifat sukarela) tetapi melanjutkan mediasi bersifat sukarela bagi pihak yang bersengketa, dan tidak ada kesepakatan yang tidak diraih secara bersama.
4. Pihak yang bersengketa tetap bertanggung jawab : mediator bias mengarahkan negosiasi, tetapi tanggung jawab atas segala macam keputusan berada di tangan pihak yang bersengketa
5. Mediasi bersifat pribadi dan rahasia : apa yang terjadi pada proses tidak untuk dibagikan kepada orang lain. Proses mediasi diadakan di tempat pribadi dan tidak ada catatan khusus dan resmi tentang apa yang di diskusikan. (Schellenberg, 1996)

Dalam studi kasus ini OKI berperan sebagai mediator dalam konflik Moro Mindanao Filipina Selatan. Dimana kita disini *mediasi* adalah proses perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dan juga membuat perdamaian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Menjadi mediator dalam konflik juga mempunyai harus memperhatikan syarat – syarat tertentu :

1. Mediator berperan memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang kesulitan menemukan jalan tengah untuk mencapai perdamaian.
2. Mediator harus berasal dari pihak yang netral tidak berpihak pada kubu manapun, mediator juga harus mengarahkan pihak-pihak menuju kesepakatan
3. Mediasi bersifat sukarela
4. Pihak yang bersangkutan tetap bertanggung jawab : mediator bias mengarahkan negosiasi. Tetapi tanggung jawab tetap atas segala keputusan tetap ditangan pihak yang bersengketa.
5. Mediasi bersifat rahasia : tidak untuk disampaikan kepada pihak lain.

Konsep resolusi konflik disini sangat relvan mengingat OKI disini selalu berupaya memberikan solusi-solusi perdamaian sejak Presiden Ferdinand Marcos yang menjabat tahun 1971-1986 pernah mencapai kesepakatan dengan pihak Mindanao yaitu melalui

perjanjian Tripoli tahun 1976 di Libya yang merupakan hasil dari negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Pemimpin Libya ketika itu Muammar Khadafi serta OKI menjadi mediator. Perjanjian ini mengalami kegagalan setelah pemerintah Filipina dianggap tidak mengakui atau mentaati isi perjanjian.

Pada masa pemerintah Cory Aquino dari tahun 1986-1992 menghasilkan perjanjian Jedda Accord tahun 1987, Cory Aquino digantikan oleh Fidel Ramos (1992-1994) dimana Fidel Ramos kembali meneruskan negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF yang kembali menghasilkan perjanjian antara keduanya dan terjadi konsolidasi antara MNLF dan pemerintah Filipina yang menghasilkan final peace agreement (FPA). Fidel Ramos digantikan oleh Estrada. Proses perdamaian yang sudah digagas dan diperjuangkan oleh presiden sebelumnya justru tidak diteruskan dan tidak ditatai oleh presiden Estrada. Sikap all out war terhadap MILF justru dibuat oleh Estrada. Pengakuan MNLF sebagai perwakilan Mindanao membuat MILF diserang oleh pemerintah Filipina, pembantaian Jbidah menewaskan 60 orang Muslim Mindanao. Hal tersebut membuat MILF mencari bantuan dari masyarakat Internasional.<sup>4</sup> Dan ditahun 2017 ini OKI melakukan upaya kembali menjadi fasilitator dalam konflik ini.

---

<sup>4</sup> Surwandono, dinamika penyebab konflik di Mindanao. (<http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/07/13/dinamika-penyebab-konflik-mindanao/>)



#### **D. Hipotesa**

1. Konflik antara pemerintah Filipina dengan suku Moro merupakan konflik berkelanjutan sehingga sudah menjadi isu global dan OKI hadir sebagai Global Governance untuk memberikan solusi dari konflik tersebut.
2. OKI menjadi mediator berperan memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang kesulitan menemukan jalan tengah untuk mencapai perdamaian. Disini jelas OKI turun tangan memfasilitasi perundingan ke 2 belah pihak antara pemerintah Filipina dan suku Moro

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran OKI dalam upaya menangani konflik Moro Mindanao Filipina Selatan” terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya yaitu:

1. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat oleh penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan yang ada sebagai salah satu bentuk pendalaman ilmu.
2. Menjelaskan lebih dalam mengenai peran OKI dalam menangani konflik Moro Mindanao Filipina Selatan
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Hubungan Internasional.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini membahas bagaimana peran OKI menangani konflik Moro Mindanao Filipina Selatan dengan berbagai solusi yang ditawarkan untuk mencegah berbagai gencatan senjata yang terjadi antara pihak pemerintah Filipina dan suku Moro.

## **G. Metode Analisis dan Pengumpulan Data**

Penulisan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan pengumpulan dan analisa data sekunder yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar baik cetak maupun elektronik. Tentunya sumber yang digunakan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika dari Penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Bab I, Akan dipaparkan tentang struktur konstruksi skripsi secara keseluruhan yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan, jangkauan, metode pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan.
- Bab II, Menjelaskan latar belakang masalah terjadinya konflik antara suku Moro dan pemerintah Filipina Selatan

- Bab III, Memaparkan Bagaimana Peran OKI dalam menangani konflik di Mindanao Filipina Selatan tersebut
- Bab IV, Hasil yang diraih OKI selama menjadi mediator dalam konflik tersebut
- Bab V, Kesimpulan.